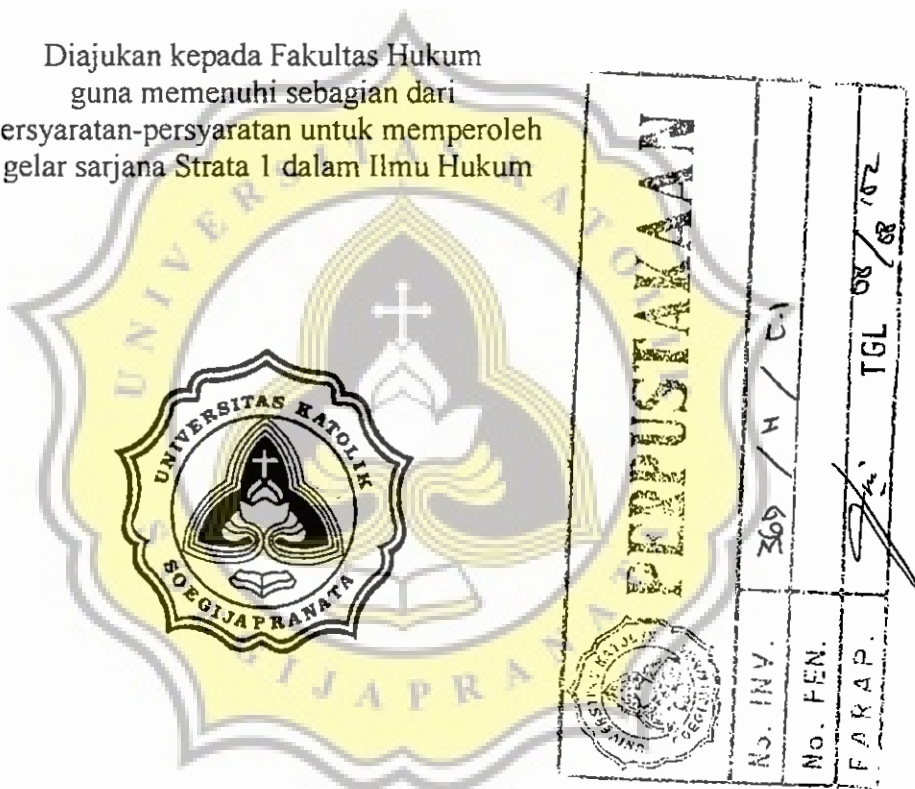


TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KERJA GAPENSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi sebagian dari
persyaratan-persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama : R.Agung Waskitoadi
NIM : 96.20.1393
NIRM : 96.6.111.01000.50076

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI
PEMERINTAH DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI
DI WILAYAH KERJA GAPENSI JAWA TENGAH.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi sebagian dari
persyaratan-persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Nama : R. Agung Waskitoadi
NIM : 96.20.1393
NIRM : 96.6.111.01000.50076

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Juni 2002

FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGIJAPRANATA SEMARANG



(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Dekan
FAKULTAS HUKUM

Mengetahui:

Handwritten signature of Y. Budi Sarwo in black ink.

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua

Handwritten signature of Petrus Soerjowinoto in black ink.

(Petrus Soerjowinoto, S.H. M.Hum)

Sekretaris

Dosen Penguji:

1. St. Hery Haryadi, SH., M.Hum.
2. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.
3. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the examiners listed in the list above. Each signature is placed above a dotted line.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Rindu akan kebahagiaan mengalir dalam darah kita. (E.V. Lucas)
2. Seorang yang bahagia tidak punya waktu untuk merasa lelah. Kebahagiaan akan menarik seluruh perhatiannya. (E.F. Benson)
3. Beruntunglah seorang penulis yang didesak oleh deadline. Kalau punya banyak waktu tulisannya justru akan lebih buruk. (Karl Kraus)
4. Lebih baik menjadi orang yang punya sikap, dari pada plin-plan. (A.C. Benson)



PERSEMBAHAN:

Karya sederhana ini kupersembahkan bagi:

- Tuhan Yesus
- Mama dan Papaku
- Adikku Damar
- Ririn
- Almamaterku
- Teman-temanku
- Dan Dunia Jasa Konstruksi.

KATA PENGANTAR

Hanya dengan berkat dan karunia-Nya, serta dengan bekerja keras yang disertai dengan ketabahan dan kesabaran selama kurang lebih dua tahun terakhir, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Sudah barang tentu saya harus mengakui dengan jujur bahwa skripsi ini sebagai suatu karya tulis ilmiah adalah masih jauh dari memadai, masih banyak kekurangannya disana sini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan saya dan khususnya didalam bidang karya tulis ilmiah saya masih berada pada tingkat pemula.

Saya mengakui bahwa di dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak telah memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan kepada saya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila pada kesempatan ini dan di tempat ini pula saya merasa wajib untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk memberikan dorongan, semangat, bimbingan, serta informasi dan waktu yang sangat berharga demi kelancaran skripsi ini.
4. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH. CN., selaku Dosen Wali yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

-
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengajar saya selama ini.
 6. Seluruh staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam administrasi.
 7. Bapak Ir. H. Kecuk Hendradyadi, selaku Ketua Umum GAPENSI Jawa Tengah yang telah memberi izin untuk mengadakan penelitian dan Informasi-informasi yang penting berkaitan dengan Skripsi ini.
 8. Bapak Marthen H. Toelle, SH., selaku Ketua Tim Advokasi Hukum GAPENSI Jawa Tengah yang telah memberikan waktu, bimbingan, dorongan dan informasi yang berharga demi kelancaran skripsi ini.
 9. Mbak Aning, selaku Sekretaris Bapak Marthen yang ditengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk mencari data-data yang dibutuhkan peneliti.
 10. Bapak Budi Santoso, selaku Kepala Bagian Pembangunan Purworejo yang telah memberikan pinjaman buku-buku.
 11. Bapak Mujahid, selaku Wakil Kepala Bina Marga Propinsi Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi ini.
 12. Bapak Subroto, selaku Staf Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya dalam memberikan informasi yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

-
13. B. Rorita Dewi, SE., yang selalu membantu dan memberikan dorongan-dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
 14. Teman-teman di Yayasan PERCIK, yang memberikan pinjaman buku, fasilitas, dan dorongan kepada penulis.
 15. Teman-teman Parikesit, yang selalu memberikan doa dan dorongan sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 16. Teman-teman yang juga dibimbing oleh Bu Endang, seperti Yudi, Nurwanto, Yeni, Sisca, Wayan, Deni, Indah, Dian, Wiwik, Dwi, Atik, Vero, Rinto, Hita, Yos dan masih banyak lagi sehingga tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kritik, saran, dorongan, dan meminjamkan bahan-bahan yang sangat berharga.

Sebagai akhir dari kata pengantar ini saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih dan rasa bakti saya yang setulus-tulusnya kepada papa saya Pradjarta Dirdjosanjoto dan mama saya Sri M. Pradjarta, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang yang mendalam dan dengan penuh kesabaran. Juga kepada saudara saya Damar, yang telah membantu saya dengan penuh perhatian.

Harapan saya semoga skripsi ini menjadi sumbangan bagi dunia Jasa Konstruksi dan dunia pendidikan, walaupun sangat kecil.

Semarang, Juni 2002

Penulis

ABSTRAKSI

Salah satu bentuk dari tugas pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum adalah melakukan pembangunan fisik seperti gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik/perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi. Untuk memenuhi kebutuhan fisik tersebut pemerintah melakukan proses pengadaan barang/jasa yang diharapkan dapat menjamin jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara efektif dan efisien, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Dalam proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah ini tahap pra-kontrak merupakan suatu tahapan yang penting, karena pada tahap inilah dilakukan seleksi terhadap calon rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa instansi pemerintah itu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka proses seleksi tersebut, beserta seluruh unsur yang terkait di dalamnya, harus memenuhi standart profesionalitas yang tinggi seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan utama yang muncul adalah: (1) bagaimana sebenarnya ketentuan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintahan (2) bagaimana ketentuan-ketentuan hukum atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah dalam mengatur proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintahan dalam usaha jasa kontruksi di daerah, khususnya yang ada di daerah propinsi Jawa Tengah ini, khususnya yang menyangkut prosedur,

metode ataupun proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintahan dalam jasa konstruksi, dan (3) bagaimana peran-peran para pihak dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di Jawa tengah.

Untuk melandasi analisa serta pembahasan terhadap permasalahan utama yang muncul, maka peneliti melandasinya dengan beberapa teori yang berkaitan dengan Proses Pengadaan barang/jasa instansi pemerintah. Teori-teori tersebut antara lain tentang: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tugas Pemerintah Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perbuatan Pemerintah, Macam-Macam Perbuatan Pemerintah, Urutan Berlakunya Peraturan, Peranan para pihak dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, Usaha Jasa konstruksi, Pengertian Jasa Konstruksi, Pihak-Pihak Dalam Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang/jasa, dan metode pengadaan barang/jasa.

Dalam menganalisa serta membahas permasalahan umum yang muncul tersebut di atas maka peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data kepustakaan) terutama yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Untuk spesifikasi penelitian digunakan Deskripsi Analitis, dimana segi-segi hukum mengenai proses pelelangan di wilayah Jawa Tengah sedapat mungkin digambarkan dan dianalisa secara menyeluruh dan sistematis. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data kepustakaan tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dari data-data sekunder yang diperoleh kemudian di analisa

dengan menggunakan metode analisa normatif kualitatif. Dengan metode penelitian ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan.

Dalam dunia Jasa Konstruksi, kemunculan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi merupakan suatu kemajuan, karena sebelum tahun 1999 atau sebelum keluarnya Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, jasa konstruksi diatur hanya dengan Keppres.

Keluarnya UU No.18 Tahun 1999 telah diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksana yang mengatur secara sangat detail prosedur dan proses pengadaan barang/jasa. Dalam metode pelelangan misalnya terdapat 13 tahapan yang harus dilalui untuk menentukan pemenang atau penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan. Hanya saja pengaturan yang sangat rinci itu ternyata telah membatasi ruang gerak dari aparat di daerah untuk memunculkan suatu kebijakan baru yang mereka perlukan.

Menurut ketentuan Keppres, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan 4 (empat) metode, yaitu: Pelelangan, Penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan swakelola. Namun pada prinsipnya pengadaan barang/jasa instansi pemerintah harus mengutamakan melalui metode pelelangan.

Dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah ini, terdapat empat pihak yang berperan imperatif. Keempat pihak tersebut adalah pihak pengguna jasa, pihak penyedia jasa, pihak LPJK, dan pihak Asosiasi (GPENSI). Berkaitan dengan peran GAPENSI, asosiasi perusahaan/profesi jasa konstruksi ini, selain melakukan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi seperti yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang, dalam setiap tahapan dalam proses pelelangan juga melaksanakan

pengawasan untuk melindungi kepentingan dan menjamin perlakuan yang adil terhadap para anggotanya. Secara proaktif Gapensi Jawa Tengah juga melaksanakan program-program yang bersifat advokasi, pendidikan dan pelatihan mengenai jasa konstruksi bagi para anggotanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Ruanglingkup penelitian	8
E. Wilayah penelitian	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
G. Tahapan Penulisan	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, TUGAS PEMERINTAH	



DAERAH DAN KEBIJAKAN	
PEMERINTAH DAERAH.....	14
B. PERBUATAN PEMERINTAH.....	23
1. Perbuatan Pemerintah.....	23
2. Macam-Macam Perbuatan Pemerintah.....	24
C. URUTAN BERLAKUNYA	
PERATURAN.....	26
D. PERANAN PARA PIHAK.....	27
E. USAHA JASA KONTRUKSI.....	27
1. Pengertian Jasa Konstruksi.....	27
2. Pihak-Pihak Dalam Pekerjaan Konstruksi.....	28
F. PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE	
PENGADAAN BARANG/JASA.....	29
1. Pengertian Barang/Jasa.....	29
2. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa.....	31
3. Tujuan Pengadaan Barang/jasa.....	31
4. Pengertian Metode Pengadaan Barang/ Jasa.....	31
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	33
A. METODE PENDEKATAN.....	34

B. SPESIFIKASI PENELITIAN	34
C. LOKASI PENELITIAN DAN SUMBER INFORMASI	35
D. METODE PENGUMPULAN DATA	36
E. METODE PENYAJIAN DATA	37
F. METODE ANALISA DATA	37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
--	----

A. Ketentuan hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah dalam jasa konstruksi di wilayah Propinsi Jawa Tengah	40
a. Ketentuan umum	40
b. Ketentuan khusus	43
B. Proses, Prosedur dan Metode pengadaan barang/ jasa instansi pemerintah menurut	45
C. Peran Pihak-Pihak dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam Jasa Konstruksi	73

BAB V

PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

